

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori Teori Hukum*, Malang, Stara Press.
- Az, Lukman Santoso, 2016, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan kontrak, Kerjasama dan Bisnis*. Malang, Setara Press.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emipiris*, Jakarta, Kencana.
- Erar, Iwan Joesoef, 2021, *Teori Hukum (Dogma-Teori-Filsafat)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Erar, Iwan Joesoef, 2022, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktik)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- H.S, Salim. 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional Edisi Revisi*, Jakarta, Djambatan
- Hasbullah, Frieda, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak – Hak yang Memberikan Kenikmatan Jilid 1*, Jakarta, CV Indhill CO
- Hasbullah, Frieda, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata Hak – Hak yang Memberikan Jaminan Jilid 2*, Jakarta, CV Indhill CO
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media

- Hudiyanto, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan
- Ishaq, H. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabet.
- Kadir, Abdul, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Perangin, Effendi, 1990, *Mencegah Sengketa Tanah*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Saputra, Rendy, 2019, *Kedudukan Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Simatupang, Wilson, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perjanjian KPR BTN Ditinjau dari UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Subekti. 1992, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Cetakan ke Dua Puluh Sembilan*, Jakarta, PT Intermedia
- Sularsi, dkk, 2016, *Kajian dan Praktek Perbankan di Indonesia, Kebijakan Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen*, 2016, Responsi Bank Indonesia, Jakarta
- Syah, Mudakir Iskandar, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Syamsudin, M dan Salman Luthan. 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Trihandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Selemba Empat

Trisadini Dan Shomad, 2018, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana

Jurnal

Mamonto, Winardi, 'Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut UU No. 4 Tahun 1996', *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4, Juni 2018, hlm. 61-68

Supriyanto, Edy, 'Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan', *Yure Humano*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 70-95

Trisadini, Usanti, 'Lahirnya Hak Kebendaan', *Prespektif*, Vol. XVII, No. 1 Januari 2012, hlm. 44-53

Makalah/Tesis/Disertasi

Alusianto Hamonangan, dkk, *Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan*, Universitas Darma Agung, Medan

Amirah Fauziyah, Achamd Zaky, *Analisis Perbedaan Pengikatan Implementasi KPR Konvensional Dengan KPR Syariah*

Made Amasangsa, I Made Priyanto, *Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Fitriani, Yunesha, 2017, *Implementasi Subrogasi Dengan Lastgeving Sebagai Instrument Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Hayuning, Hutari, 2010, *Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SMF) Sebagai Alternatif Penyediaan Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Melalui Sekuritisasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Made Amasangsa, I Made Priyanto, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan,

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, Undang – undang 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta

Indonesia, Undang - Undang 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Jakarta.

Indonesia, Undang - Undang 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Jakarta.

Indonesia, Undang - Undang 1998, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan*, Jakarta.

Indonesia, Undang - Undang 1996, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*, Jakarta.

Indonesia, Undang - Undang 1960, *Undang-Undang Republik nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri 2021, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum Dan Satuan Rumah Susun Umum*, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri 2019, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun*

2019 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri 2016, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah, Jakarta.*

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri 1997, *peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Jakarta.*

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri 1974, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, Jakarta.*

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2016, Jakarta*

Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, *Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi, Jakarta*

Koran/Majalah/Internet/sumber lainnya

Devie, Lin, 'Risiko atas Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali', <https://hukumproperti.com/risiko-atas-perjanjian-jual-beli-tanah-dengan-hak-membeli-kembali/>

Aristanto, Yohanes, 'Kamus Inggris – Indonesia', www.KamusBahasaInggris.com

Sikapuangmu.ojk.go.id, 'Kredit Pemilikan Rumah'

Temukanpengertian.com, 'Pengertian KPR, Syarat, Dokumen dan Tips Memilih KPR'

Arofi Fitradani, 2023

***PENCAIRAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN JAMINAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) (ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN NO.1049
PDT.G/2020/PN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.Repository.upnvj.ac.id]